

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan di Daerah Surabaya

Grace Jean Manurung¹, Jurniyati Aswad², Keith Xsandrawitz Suharmin³, Dini Permata Indah⁴, Ivan Darmawan⁵

12345 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

ARTICLE INFO

Article history:

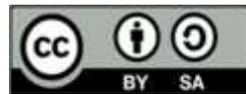
Received Juni 20, 2024
Revised Juni 25, 2024
Accepted Juni 30, 2024
Available online 10 July, 2024

Kata Kunci:

Pembinaan Pemerintahan, Pengawasan Pemerintahan, Tata Kelola, Pemerintahan Daerah.

Keywords:

Government Development, Government Supervision, Governance, Regional Government



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah Surabaya merupakan aspek penting dalam memastikan tata kelola yang baik dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme, tantangan, serta dampak dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah di Surabaya. Melalui metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintahan dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kinerja pemerintahan daerah. Namun, terdapat pula beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya dan koordinasi yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal.

ABSTRACT

Government development and supervision in the Surabaya area is an important aspect in ensuring good and effective governance. This research aims to analyze the mechanisms, challenges and impacts of guidance and supervision carried out by the central government on regional government in Surabaya. Through qualitative methods, data was collected through in-depth interviews with government officials

and study of related documents. The research results show that effective guidance and supervision can improve accountability, transparency and regional government performance. However, there are also several obstacles such as lack of resources and coordination that need to be overcome to achieve optimal results.

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan elemen penting dalam struktur kenegaraan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah telah mengalami berbagai perubahan regulasi, salah satunya adalah dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam konteks ini, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah menjadi sangat krusial untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Kota Surabaya, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki kompleksitas tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan di Surabaya tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa semua regulasi dan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik. Pembinaan meliputi berbagai aspek seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan program dan kegiatan pembangunan, serta penguatan kelembagaan. Sementara itu, pengawasan bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan, korupsi, dan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam setiap aspek pemerintahan.

Namun, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Surabaya juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan dan antar lembaga. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program-program pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif serta partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme, tantangan, dan dampak dari pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah Surabaya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan pejabat pemerintahan dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah,

*Corresponding author

E-mail addresses: gracejean749@gmail.com¹, jurniyati26.icloud.com@gmail.com², xsandrawitzk@gmail.com³, dini23011@mail.unpad.ac.id⁴, ivan.darmawan@unpad.ac.id⁵

khususnya di Kota Surabaya, sehingga dapat terwujud pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Sejarah Otonomi daerah mengalami berbagai tantangan mengenai implementasi desentralisasi. Wewenang untuk mengatur seluruh urusan dalam lingkup pemerintah daerah menjadi semakin jelas dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang tercantum pada Publika. Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021, 285-294 Pasal 1 Ayat (6) menyatakan, "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan, termasuk pemerintahan lokal di Surabaya. Keberadaan komunitas lokal sebagai suatu lingkungan sosial masyarakat perlu dibangun dari dalam sesuai dengan prioritas ketiga "Nawa Cita" Presiden Joko Widodo, yang menekankan pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan komunitas lokal dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya ini dapat dicapai melalui pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lokal di Surabaya. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan pembinaan dan pengawasan yang tercantum dalam Pasal 112, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan lokal.

Selain itu, dalam Pemandagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Keuangan Desa dijelaskan bahwa bupati/walikota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan lokal yang dikoordinasikan dengan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) daerah kabupaten/kota. Sedangkan bentuk regulasi dari Pemerintah Kota Surabaya tercantum pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan sasaran pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap dana desa. Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah kota, memiliki dasar dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan lokal yang tercantum dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 ayat (1): "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Lokal." (Amirudin, 2017:1) menyatakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pembuat kebijakan mengatasi masalah yang dihadapi. Regulasi yang ada terkait pembinaan dan pengawasan mengindikasikan pentingnya pengawasan pada pemerintahan lokal oleh pemerintah yang berada di atasnya, dalam hal ini pemerintah kota, mengingat komunitas lokal adalah lembaga yang terdiri atas wilayah dan masyarakat kultural di dalamnya. Satriajaya, dkk (2017:2) menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan lokal akibat perubahan regulasi akan sangat bergantung pada sikap, penerimaan, serta kapasitas pengelolanya.

Implementasi desentralisasi di Surabaya menghadapi sejumlah tantangan, termasuk koordinasi antar tingkat pemerintahan dan kapasitas sumber daya manusia. Kurangnya pemahaman dan kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan dan administrasi seringkali menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan bagi aparat pemerintahan lokal menjadi sangat penting untuk memastikan mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efisien. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi elemen krusial dalam otonomi daerah. Keterlibatan warga Surabaya dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) membantu memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi dalam program dan kebijakan pemerintah. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam mendukung pengelolaan pemerintahan lokal di Surabaya. Penerapan e-government dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik serta memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga. Inisiatif seperti e-budgeting dan e-planning memungkinkan proses perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Secara keseluruhan, pembinaan dan pengawasan yang efektif oleh pemerintah kota Surabaya, dengan dukungan regulasi yang memadai, kapasitas sumber daya manusia yang ditingkatkan, partisipasi aktif masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi yang optimal, diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan lokal yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji mekanisme, tantangan, dan dampak dari pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah Surabaya. Data dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait, seperti pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan ahli kebijakan publik, untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Surabaya. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung praktik pembinaan dan pengawasan di lapangan, serta untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaannya. Analisis dokumen mencakup studi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan untuk mengevaluasi kerangka regulasi dan implementasinya. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dalam konteks pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah di Surabaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai isu-isu yang ada dan untuk merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti guna meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan di masa mendatang.

HASIL

Penelitian ini mengungkap berbagai temuan penting terkait mekanisme, tantangan, dan dampak pembinaan serta pengawasan pemerintahan di daerah Surabaya. Hasil wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui beberapa mekanisme utama, termasuk pelatihan sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi program, serta audit keuangan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia mencakup berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi aparat pemerintah daerah. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Audit keuangan dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Hal ini seringkali menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan program, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pembinaan dan pengawasan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial juga menjadi hambatan yang signifikan. Banyak pejabat pemerintah daerah yang masih kurang memahami aspek teknis pengelolaan keuangan dan administrasi, sehingga diperlukan lebih banyak pelatihan dan bimbingan. Tantangan lainnya adalah resistensi dari beberapa pejabat pemerintah daerah terhadap perubahan dan inovasi, yang seringkali disebabkan oleh ketakutan akan kehilangan posisi atau kekuasaan.

PEMBAHASAN

Pembinaan dan pengawasan yang efektif adalah kunci untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di Surabaya. Dari hasil penelitian, jelas bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi program, serta audit keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan daerah. Namun, tantangan-tantangan yang ada menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan dalam koordinasi antar tingkat pemerintahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan program. Pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama. Selain itu, investasi dalam pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia harus ditingkatkan. Program-program pelatihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi aparat pemerintah daerah, sehingga mereka lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugasnya. Resistensi terhadap perubahan juga perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Melibatkan pejabat pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan komitmen mereka terhadap perubahan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam semua proses pembinaan dan pengawasan harus terus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa semua kebijakan dan program dilaksanakan dengan integritas.

Dari penelitian ini, juga terlihat bahwa penggunaan teknologi informasi dapat memainkan peran penting dalam mendukung pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah di Surabaya. Implementasi e-government, termasuk e-budgeting dan e-planning, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik serta memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga. Teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses pengumpulan data, analisis, dan pelaporan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah Surabaya, ada juga banyak peluang untuk perbaikan. Dengan peningkatan koordinasi, investasi

dalam pelatihan dan pendidikan, penerapan teknologi informasi, dan pendekatan yang lebih inklusif, pemerintahan daerah Surabaya dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

No	Sumber	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 152.800.000
2.	Dana Desa (DD)	Rp. 811.443.000
3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 391.231.500
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah	Rp. 50.396.800
5.	Bantuan Kabupaten	Rp. 425.000.000
6.	Bantuan Lain-lain	Rp. 50.000.000
Total		Rp. 1.880.871.300

Gambar 1

Salah satu hasil penting dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan daerah Surabaya. Saat ini, banyak pejabat pemerintah daerah yang masih kurang memiliki pemahaman mendalam mengenai manajemen publik, pengelolaan keuangan, dan administrasi pemerintahan yang baik. Untuk mengatasi masalah ini, pelatihan berkelanjutan dan pendidikan formal perlu lebih ditingkatkan. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti manajemen proyek, penggunaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan yang transparan, dan aspek hukum dalam pemerintahan.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya harus fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan bekerja dalam tim. Keterampilan-keterampilan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan efektif. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan organisasi non-pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan yang relevan dan berkualitas.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan daerah. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Di Surabaya, partisipasi masyarakat telah mulai terwujud melalui forum-forum seperti musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), di mana warga dapat memberikan masukan dan usulan terkait program pembangunan di wilayah mereka. Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah perlu menciptakan mekanisme yang lebih inklusif dan mudah diakses. Penggunaan teknologi informasi, seperti platform online untuk konsultasi publik dan survei warga, dapat menjadi salah satu solusi efektif. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses pengawasan, serta cara-cara untuk berpartisipasi secara efektif.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah aspek lain yang penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah di Surabaya. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi e-government dapat memberikan banyak manfaat, termasuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Program-program seperti e-budgeting dan e-planning memungkinkan proses perencanaan dan penganggaran yang lebih terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Namun, implementasi teknologi informasi juga menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi dan keterampilan digital di kalangan pejabat pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai serta menyediakan pelatihan dan dukungan teknis bagi para pegawai. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan tinggi dapat membantu mempercepat adopsi teknologi dan meningkatkan kapasitas digital di pemerintahan daerah.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya kebijakan dan regulasi yang mendukung dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Regulasi yang jelas dan konsisten diperlukan untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Selain itu, regulasi juga harus fleksibel untuk dapat menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan lokal. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, misalnya, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi regulasi secara berkala dan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut sangat diperlukan. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah Surabaya memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Berbagai temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya koordinasi antar tingkat pemerintahan, keterbatasan sumber daya manusia, dan resistensi terhadap perubahan, terdapat juga peluang besar untuk perbaikan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, partisipasi aktif masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan kebijakan yang mendukung. Pentingnya regulasi yang jelas dan konsisten juga ditekankan untuk memberikan panduan yang tepat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dengan adopsi strategi yang terintegrasi dan kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pemerintahan daerah Surabaya dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Perbaikan terus-menerus dalam pembinaan dan pengawasan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi kota Surabaya ke depan.

REFERENSI

- Abdin, M. (2020). Kedudukan dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pattimura Civic*, 1(1), 1-9.
- Agung Honesta Yuristyan Sayuti, Jazim Hamidi, M. D. (2014). Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Prinsip Good Village Governance. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1, 1-20.
- Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). *Laporan Indonesia Corruption Watch Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*.
- Amirudin, A. (2017). Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 26-32.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara Kajian konsep, Teori, dan Fakta Dalam Menciptakan Good Governance* (B. A. Saebani (ed.)). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Fardhy, A., & Yanuardi. (2005). Efektivitas Pelaksanaan Program Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMD-WP) di Kabupaten Sleman. *Jurnal FIS UNY*, 1-11.
- Farid, M., Pradana, G. W., & Eprilianto, D. F. (2020). Study of Village Funding Control at East Java Province Inspectorate Through Village Management Consulting. *Journal of Advances in Economics, Business and Management Research*, 125(Icpapg 2019), 216-227.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29-46.
- Khoiriah, Siti, Meylina, U. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 66(1), 20-29.
- Kurnia, T. S., Rauta, U., Siswanto, A., Hukum, F., Kristen, U., Wacana, S., & Tengah, J. (2017). E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 170-181.
- Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 404-420.
- Lusiono, E. F., & Suharman, S. (2017). Analisis Penerimaan Aplikasi Siskeudes di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2).